

**Partisipasi Masyarakat pada PNPM Mandiri Pedesaan  
Dalam Konteks Otonomi Daerah  
(Studi Kasus di Kampung Pepas Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat)**

**Nathanael**

Alumni Program Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

**Abstract:** Participatory rural development program is a fundamental concept that has been releasing at long time ago and still be relevant in the future. Citizen participation in development was increased, and it leads to social welfare. To empower a member of society, government has declared the National Program of Society Empowering, Rural Autonomy which was implemented since 2007. The study results indicate that the degree of citizen participation in the PNPM activities at Pepas Asa Village is relatively low. Therefore, absolutely it is required to improve of society participation by optimizing the awareness activity and effectively socialization; and give priority to capacity building of apparatus and citizen, not only to infrastructure development.

**Keywords:** Participatory, rural development, PNPM

**Abstrak:** Program pembangunan desa partisipatif adalah konsep fundamental yang telah dirilis sejak lama dan masih tetap relevan di masa yang mendatang. Partisipasi warga dalam pembangunan meningkat, dan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk memperkuat anggota masyarakat, maka pemerintah telah mendeklarasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang telah diimplementasikan sejak tahun 2007. Hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi warga dalam aktivitas PNPM di desa Pepas Asa relative rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan kesadaran dan sosialisasi yang efektif; dan memberikan prioritas terhadap peningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat, bukan hanya pada pembangunan infrastuktur.

**Kata Kunci:** Partisipatif, Pembangunan Desa, PNPM

## **Pendahuluan**

Dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menerapkan prinsip otonomi daerah yang menekankan pada pemerataan dan keadilan, pemberdayaan masyarakat, serta penghargaan terhadap potensi dan keanekaragaman lokal, maka sudah seharusnya mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kampung dilakukan perubahan yang mendasar. Pendekatan yang bersifat *bottom up* haruslah menggantikan model pendekatan *top down* yang selama ini diterapkan atau adanya perubahan dari pendekatan atau dari paradigma *state centered* menjadi *people centered*.

Sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan, maka Pemerintah Pusat telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, yang telah digulirkan secara nasional pada tahun 2007. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses

perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kampung Pepas Asa relatif rendah. PNPM Mandiri Perdesaan ini telah digulirkan secara nasional oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2007. Warga Kampung Pepas Asa mengajukan usulan dan melaksanakan program ini pada tahun 2007 dengan hasil berupa fasilitas air bersih untuk warga kampung. Namun demikian, proyek tersebut baru bisa diselesaikan pada tahun 2008. Sehingga pada tahun 2008 tidak dapat melaksanakan kegiatan baru. Kemudian di tahun 2009 mengajukan kegiatan pembangunan sarana kesehatan berupa gedung posyandu. Ternyata proyek ini baru dapat diselesaikan tahun 2011. Dengan demikian, dalam rentang waktu kurang lebih lima tahun (2007-2011), hanya terdapat dua kegiatan yang diajukan dan dilaksanakan di Kampung Pepas Asa.

Lebih jauh lagi, setelah mencermati pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, terungkap bahwa proses penyelesaiannya tidak tepat waktu. Masa penyelesaian program tersebut adalah tiga bulan, sesuai dengan hasil musyawarah yang dilaksanakan sebelum kegiatan dilaksanakan. Penyebab utama dari keterlambatan ini adalah semakin minimnya tenaga yang terlibat dalam kegiatan pembangunan tersebut.

Fenomena tersebut di atas mendorong minat penulis untuk mengkaji lebih mendalam mengenai partisipasi anggota masyarakat dalam program pembangunan di kampung. Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam pembangunan kampung, karena masyarakat setempatlah yang mengetahui apa yang dibutuhkan. Partisipasi adalah wujud nyata dari konsep pembangunan “dari, oleh, dan untuk” masyarakat kampung.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan**

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Menurut Adisasmitha (2006) pembangunan pedesaan pada dasarnya merupakan kegiatan terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial-ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan diprogramkan untuk diarahkan pada perbaikan kondisi hidup masyarakat sebagai upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik. Dengan demikian sasaran utamanya adalah masyarakat itu sendiri. Untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya, maka partisipasi masyarakat menjadi mutlak. Carlson (1985) mengungkapkan bahwa masyarakat akan lebih mudah menerima program pembangunan apabila mereka dapat merasa bahwa hal itu secara wajar, sesuai dengan kebutuhan mereka, serta sesuai dengan kebudayaan.

Adisasmitha (2006) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam kegiatan pedesaan, yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dikerjakan dalam

masyarakat lokal. Partisipasi merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Mengapa anggota masyarakat diajak untuk berperan aktif dan didorong untuk berpartisipasi? Pertimbangannya adalah masyarakat dipandang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingan atau kebutuhan mereka, yakni:

- a. Mereka memahami tentang keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakatnya;
- b. Mereka mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kegiatan yang terjadi dalam masyarakat;
- c. Mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan asal-usul kata, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” yang mengandung arti kekuasaan atau keberdayaan. Karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan langsung dengan konsep kekuasaan, demikian dikemukakan oleh Suharto (2006). Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir tahun 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan.

Ife (dalam Suharto, 2005) menyebutkan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*”, demikian menurut Chambers (1995). Konsep ini lebih luas dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.

Friedman (dalam Sumodiningrat, 2007) menegaskan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Singkatnya, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

### **PNPM Mandiri Perdesaan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: a) dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan; b) dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (*capacity building*); dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih.

### **Otonomi Desa**

Widjaja (2005) mengatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri inilah yang disebut otonomi desa.

Kampung otonom menurut pandangan Tjokrowinoto (1996) adalah kampung yang warganya: (1) memiliki semangat untuk membangun yang tinggi; (2) mempunyai kepekaan untuk mengidentifikasi permasalahan kampung; (3) mampu menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan; (4) melaksanakan rencana dengan seefektif dan seefisien mungkin yang bertumpu pada sumber daya dan dana dari masyarakat; serta (5) mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. Oleh karena itu, maka pembangunan masyarakat kampung mutlak dilakukan atas dasar tiga asas (Ndraha, 1996), yaitu asas pembangunan integral, asas pemufakatan bersama dan asas bertumpu pada kekuatan sendiri. LP3ES (2008), melakukan studi Baseline Kualitatif PNPM Mandiri Perdesaan di tiga Provinsi, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat. Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan PNPM secara umum cukup efektif dalam memberikan pengaruh terhadap proses pembelajaran bagi aparat desa dan warga masyarakat dalam mengembangkan sistem dan mekanisme kerja yang partisipatif dan demokratis, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam memilih jenis kegiatan. Yuvenalis (2009), melakukan studi kasus tentang partisipasi masyarakat dalam program Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Lingsang Melapeh Kecamatan Lingsang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap kebijakan program ADK, baik pada tahap

perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan secara umum relatif cukup baik. Syukri, Mawardi, Akhmadi (2011), melakukan studi kualitatif PNPM-Perdesaan di Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tenggara. Secara umum studi ini menemukan bahwa PNPM-Perdesaan sudah dijalankan dengan baik. Namun hanya sebagian kecil dari program tersebut yang sungguh-sungguh dapat dinikmati masyarakat miskin. Terkait dengan isu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, terdapat perbedaan mencolok antara apa yang terjadi di dalam program dan diluar program. Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan sangat baik dalam PNPM-Perdesaan, tetapi di luar program tersebut ketiga aspek tadi masih sangat rendah. Selain itu pemberdayaan masyarakat juga tidak berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa hampir tidak ada proyek PNPM yang bersesuaian dengan kebutuhan utama masyarakat miskin.

### **Kerangka Pemikiran**

Titik tolak pemikiran penulis adalah realitas di lokasi penelitian, yakni fenomena partisipasi masyarakat di Kampung Pepas Asa dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Realitas partisipasi tersebut ditelaah dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi tiga kegiatan yang bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis data penulis mendasarkan diri pada konsep pembangunan partisipatif, dan mengacu pula pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, prinsip-prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan.

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini maksudnya adalah keterlibatan masyarakat Kampung Pepas Asa secara aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur kampung yang memadai berupa sarana air bersih (2007) dan fasilitas posyandu (2009) pada PNPM Mandiri Perdesaan. Wujud partisipasi yang ditelaah adalah keterlibatan dalam prakarsa pembangunan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dalam pembiayaan pembangunan, keterlibatan dalam memobilisasi tenaga, keterlibatan dalam pemeliharaan hasil pembangunan, keterlibatan dalam menyelesaikan permasalahan.

Partisipasi masyarakat juga tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi keterlibatan dalam pembangunan. Terdapat faktor yang sifatnya mendukung sehingga memungkinkan terwujudnya kondisi masyarakat yang mandiri. Dan terdapat pula faktor yang sifatnya menghambat atau menjadi kendala partisipasi sehingga pada akhirnya kemandirian kampung pun tidak dapat dicapai.

Kampung otonom adalah kampung yang masyarakatnya aktif dan kreatif dalam membangun, mampu mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan kampung dengan bertumpu pada sumberdaya dan dana yang dimiliki, mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan yang telah dan sedang berlangsung.

### **Pembahasan**

Kampung yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kampung Pepas Asa. Secara administratif, Kampung Pepas Asa terletak dalam wilayah administratif

Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Kampung Pepas Asa jika dibandingkan dengan kampung-kampung lain di kecamatan yang sama relatif luas, yakni mencapai 49,29 Km<sup>2</sup> atau 6,67% dari luas kecamatan. Wilayah geografis yang luas tersebut umumnya di luar kawasan hutan. Topografi kampung rata-rata berupa wilayah dataran, dengan ketinggian di atas permukaan laut adalah 160 meter.

Dari data kependudukan Kampung Pepas Asa pada Tahun 2011 diketahui jumlah penduduk sebanyak 164 jiwa yang terdiri dari 74 penduduk laki-laki dan 90 penduduk perempuan, sehingga *sex ratio* penduduk adalah 82,22. Jumlah KK adalah 49 KK.

Mata pencaharian utama masyarakat kampung Pepas Asa adalah berkebun karet dan berladang. Komoditi karet merupakan komoditi andalan bagi hampir semua masyarakat. Oleh karena itu, pembukaan lahan perladangan umumnya dimaksudkan juga untuk dijadikan lahan perkebunan karet.

Kondisi sarana dan prasarana secara umum di Kampung Pepas Asa sampai dengan saat ini belum memadai, terutama sarana dan prasarana jalan. Sarana kesehatan yang ada yaitu posyandu, yang dibangun melalui PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009. Terdapat juga sarana lain yang dibangun melalui PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2007, yakni sarana air bersih. Sarana pemerintahan kampung cukup memadai, yaitu berupa kantor terpadu aparat kampung. Keduanya dibangun melalui program Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Kutai Barat

### **Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Yang Dilaksanakan**

Dalam realitasnya, proyek pembangunan PNPM Mandiri Perdesaan di Kampung Pepas Asa yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun (2007 – 2011) hanya terdapat dua kegiatan saja, yaitu: pembangunan sarana air bersih, dan pembangunan gedung posyandu. Proyek air bersih merupakan realisasi dari proposal kegiatan PNPM pada tahun 2007. Proyek pembangunan gedung posyandu adalah realisasi dari usulan warga pada tahun 2009. Kedua hasil proyek tersebut saat ini telah dinikmati oleh warga Kampung Pepas Asa, terutama air bersih yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari warga kampung.

### **Pendanaan Kegiatan PNPM**

Inti dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah bertumpu pada swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat merupakan wujud partisipasi dalam tahapan PNPM yang berupa sumbangan pikiran, tenaga, dana, atau material. Dasar dari keswadayaan ini adalah kerelaan atau ketulusan hati masyarakat, sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau paksaan.

Untuk menumbuhkan keswadayaan masyarakat, pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memberikan dana stimulan yang bersumber dari APBN dan APBD. Dana dari pemerintah untuk kegiatan pembangunan sarana air bersih sebesar Rp55.528.000,00. Sedangkan total dana untuk kegiatan pembangunan gedung posyandu adalah sebesar Rp112.016.500,00.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (2009) diketahui bahwa alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan,

dan tahap pelestarian kegiatan. Studi ini dimaksudkan untuk mencermati partisipasi masyarakat kampung Pepas Asa dalam setiap tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, dengan berfokus pada wujud partisipasi dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Sekurang-kurangnya ada enam wujud partisipasi, yakni: keterlibatan dalam prakarsa pembangunan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dalam pembiayaan pembangunan, keterlibatan dalam mobilisasi tenaga, keterlibatan dalam mengatasi masalah, dan keterlibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Mengacu pada hasil temuan di lokasi penelitian, rangkaian kegiatan partisipatif dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di Kampung Pepas Asa dapat diidentifikasi sebagai berikut ini.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan**

Partisipasi masyarakat Kampung Pepas Asa dalam perencanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan diawali dengan keterlibatan dalam proses pemetaan kemiskinan. Dari hasil wawancara mendalam dengan warga Kampung Pepas Asa terungkap bahwa karakter kemiskinan yang dominan berpusat pada kepemilikan aset, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan pekerjaan. Namun demikian, berdasarkan pengamatan penulis, masyarakat kampung Pepas Asa yang umumnya memiliki mata pencaharian utama sebagai petani karet, sudah cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Bahkan ada warga yang memiliki fasilitas kendaraan yang relatif memadai, seperti sepeda motor, dan mobil (lih. Lampiran Gambar 2.6). Ini berarti bahwa kemiskinan yang dialami oleh warga kampung adalah kemiskinan dalam hal keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya.

Apa yang dikemukakan di atas sejalan dengan pendapat Chamber (1983) yang menyebutkan bahwa kemiskinan berkaitan pula dengan masalah akses terhadap sumber daya air, tempat tinggal, layanan kesehatan dan sanitasi, pendidikan dan transportasi. Jika demikian, maka pilihan warga masyarakat mengajukan usul kegiatan berupa penyediaan sarana air bersih dan fasilitas posyandu, dalam konteks ini sudah tepat.

Tentang keterlibatan warga dalam hal penyampaian gagasan atau prakarsa pembangunan, berdasarkan data-data yang diperoleh dan pengamatan penulis, dapat ditegaskan kembali bahwa dalam hal prakarsa pembangunan, tampak adanya keterlibatan dari masyarakat Kampung Pepas Asa. Keterlibatan dalam hal prakarsa ini bila ditelaah lebih jauh, masih bersifat instrumental. Artinya hanya untuk memenuhi persyaratan program. Dalam bahasa Arstein dalam Herrawaty (2006), keterlibatan yang demikian itu disebut sebagai keterlibatan semu. Masyarakat tampak terlibat dalam hal prakarsa, tetapi sesungguhnya perencanaan ide awal berasal dari pemerintah, dan juga model atau format dalam hal penyusunan dan pengajuan proposal kegiatan adalah gagasan pemerintah.

Jika dalam penelitian Syukri, *et al.* (2011) disebutkan bahwa ketidakaktifan warga dalam prakarsa atau penyampaian gagasan salah satunya dikarenakan oleh dominannya elite desa, maka tidak demikian dengan kasus di Kampung Pepas Asa. Faktor-faktor dari individu itu sendiri lebih menentukan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Angell dalam Wikipedia (2011) bahwa partisipasi dapat

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Partisipasi masyarakat Kampung Pepas Asa terungkap pula wujud keterlibatan dalam hal pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keterlibatan warga masih bersifat formalitas. Keterlibatan seperti ini, oleh Arstein dalam Herrawaty (2006) disebut sebagai partisipasi semu. Warga ikut dalam rapat tetapi ada keengganan untuk memberikan pendapat dan mempengaruhi keputusan. Setelah ditelaah lebih dalam terdapat indikasi bahwa keengganan ini disebabkan oleh karena masyarakat tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk terlibat secara produktif dalam pengambilan keputusan. Tampaknya kapabilitas warga masyarakat ini berkorelasi dengan rata-rata tingkat pendidikan warga masyarakat yang umumnya masih rendah. Juga ada indikasi bahwa belum ada instrumen hukum yang mengatur tentang bagaimana, dimana dan siapa yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan**

Tahap pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan merupakan tahap yang sangat penting dan krusial, karena akan menentukan keberhasilan rangkaian kegiatan. Sebaik apapun perencanaan yang telah dibuat akan menjadi sia-sia jika tidak dilaksanakan. Oleh karena itu tahap ini dipandang sebagai tahap yang kritis dalam rangkaian kegiatan. Dapat dikatakan pula bahwa keberhasilan suatu program secara keseluruhan lebih banyak ditentukan oleh keberhasilan yang diraih pada tahap pelaksanaan. Pentingnya tahapan ini tidak berarti mengecilkan pentingnya tahap perencanaan maupun tahap pelestarian hasil pembangunan.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat Kampung Pepas Asa adalah mutlak. Oakley (1991) berpendapat bahwa partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan oleh karenatannya tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada perwujudan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud.

Realitas partisipasi masyarakat Kampung Pepas Asa sebagaimana telah dipaparkan di atas, bila ditinjau berdasarkan tipologi partisipasi sebagaimana dikemukakan oleh Arstein dalam Herrawati (2006), maka dapat dikategorikan sebagai partisipasi semu. Mengapa demikian? Patut diapresiasi bahwa masyarakat telah terlibat dalam kegiatan fisik. Namun demikian bila ditelaah lebih dalam tentang motivasi keterlibatan, pada umumnya keterlibatan ini tidaklah sukarela. Hal ini tersirat dalam alasan-alasan yang dikemukakan oleh beberapa anggota masyarakat.

Mengacu pada pandangan Davis dalam Sastropoetro (1988), terdapat unsur penting yang menjadi prasyarat dalam partisipasi yakni bahwa adanya keterlibatan mental dan emosional daripada keterlibatan secara fisik, sehingga yang muncul adalah partisipasi sukarela dan bukannya partisipasi yang dipaksakan. Dengan demikian orang terdorong untuk menyumbangkan sesuatu dan bukan sekedar menyetujui terhadap sesuatu kegiatan. Dan lebih jauh lagi, orang terdorong pula untuk ikut bertanggung-jawab dalam suatu ide atau kegiatan, dari awal sampai dengan selesainya suatu kegiatan.



Motivasi utama dalam partisipasi hendaklah didasarkan pada niat yang tulus atau kerelaan hati, tidak semata demi keuntungan pribadi, seperti yang ditegaskan oleh Mubyarto dalam Yuvenalis (2009) bahwa partisipasi merupakan kesediaan untuk membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Hal ini senada juga dikemukakan oleh Adisasmita (2006), yakni bahwa partisipasi masyarakat itu hendaklah merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan untuk berkorban dan berkontribusi dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan mencermati data yang disampaikan oleh warga, penulis menilai bahwa tingkat partisipasi warga yang cenderung menurun setidaknya disebabkan oleh beberapa alasan, yakni: pertama, warga sibuk dengan pekerjaan sehari-hari untuk mencari nafkah. Penilaian yang dikemukakan tersebut kira sejalan dengan gagasan Angell dalam Wikipedia (2011) bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi adalah pekerjaan dan penghasilan. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari akan mendorong seseorang untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan masyarakat.

Kedua, warga mengharapkan insentif lebih. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan dalam suatu kegiatan adalah adanya hadiah dari kegiatan atau keuntungan lebih yang mungkin didapat dari kegiatan tersebut, demikian menurut Subrata dan Atmaja dalam Sopino (1998).

Ketiga, terbatasnya kemampuan dan wibawa aparat kampung untuk memobilisasi warga. Secara teoritis, pentingnya peranan pemuka masyarakat dalam menumbuhkan partisipasi diakui oleh Mutadi dalam Sopino (1998). Disebutkan bahwa peranan pemuka masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap warga, karena itu kerap terjadi bahwa program pemerintah gagal karena tidak mengikutsertakan pemuka masyarakat.

Sehubungan dengan pola penanganan masalah, dapat dikatakan bahwa di Kampung Pepas Asa belum terdapat mekanisme resolusi masalah yang baku untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan program pembangunan. Ketika ada permasalahan, penanganannya dilakukan secara sporadis dan pengurus kampung atau pengurus kegiatan bertindak sebagai pelaku utama dalam menyelesaikannya. Jika ada permasalahan, umumnya ditangani dengan memberikan penjelasan atau musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat lainnya.

Terhadap permasalahan yang timbul, warga masyarakat umumnya hanya bersikap diam. Masyarakat menyadari adanya ketidakberesan dalam penggunaan dana, namun cenderung untuk menyimpannya sendiri atau hanya membicarakan dengan sesama warga. Hal ini antara lain disebabkan oleh rasa enggan atau tidak nyaman untuk mengungkap aib orang di dalam forum resmi. Selain itu, masyarakat mempercayakan pada pengurus kampung dan atau pengurus kegiatan untuk menangani masalah yang timbul, karena merekalah yang memiliki kewenangan.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan**

Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*). Oleh karena itu mutlak diperlukan adanya upaya pelestarian. Pelestarian adalah tahapan

pascapelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Ini berarti bahwa partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar hasil-hasil kegiatan PNPM dapat lestari atau bermanfaat secara berkelanjutan. Jika tidak, maka sanksinya sudah jelas, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat maka kampung yang bersangkutan tidak akan mendapat dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya (PTO, 2009).

Tentang adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan adalah kegiatan pemerintah, penulis cenderung berpendapat bahwa hal itu merupakan salah satu dampak dari pola pendekatan pembangunan yang telah lama dilakukan pemerintah pada masa lalu, yakni pendekatan *top down*. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat mutlak dilakukan. Masyarakat harus menempatkan posisinya sebagai subyek dalam setiap tahapan pembangunan kampung.

Dalam konteks inilah komunikasi pembangunan menjadi penting. Harun dan Ardianto (2011) mengatakan bahwa komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan dan ketrampilan-ketrampilan pembangunan kepada masyarakat luas. Ini bertujuan agar masyarakat memahami, menerima, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan. Dalam hal ini, PNPM Mandiri Perdesaan mutlak diformasikan dan disosialisasikan secara lebih efektif kepada masyarakat Kampung Pepas Asa.

Secara umum, keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan ini relatif baik. Hal ini ditandai dengan adanya inisiatif pengurus dan warga melalui musyawarah, menetapkan biaya atau tarif yang dibebankan pada masyarakat yang menggunakan sarana air bersih. Dana ini dimanfaatkan untuk biaya operasional dan perawatan sarana air bersih tersebut. Meskipun ada segelintir warga yang mengeluh, tetapi umumnya warga tunduk dan taat pada keputusan bersama tersebut.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam PNPM Mandiri Perdesaan**

Partisipasi warga masyarakat kampung dipengaruhi oleh banyak faktor. Sifat faktor tersebut bisa mendukung atau juga menghambat keberhasilan program. Faktor yang menghambat ini dapat juga disebut sebagai kendala partisipasi.

Dari beberapa faktor yang terungkap dalam penelitian, yang cenderung dominan mempengaruhi tingkat keterlibatan warga adalah faktor pekerjaan dan penghasilan, faktor insentif atau balas jasa dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, dan faktor kemampuan aparat kampung memobilisasi warga.

Terkait dengan arus informasi yang terbatas, disinyalir bahwa ketidaktahuan segelintir warga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program. Dengan kata lain arus informasi belum berlangsung secara maksimal dan transparan. Belum maksimalnya penyampaian informasi secara terbuka karena adanya hambatan struktur sosial dan keterbatasan infrastruktur. Kelompok elite kampung dan juga pengurus lainnya cenderung berperan sebagai pihak yang paling tahu tentang program dan lebih bertanggungjawab dibanding masyarakat umum. Di lain pihak

masyarakat umum cenderung pasif bahkan tidak peduli. Mereka menunggu saja informasi yang disampaikan oleh aparat, dan jarang sekali masyarakat proaktif. Sikap apatis warga ini kemungkinan juga karena warga merasa tidak berkepentingan terhadap informasi tersebut. Yang lebih penting adalah bahwa pekerjaan sehari-hari berlangsung dengan baik. Pada gilirannya sikap masyarakat ini mungkin juga menjadi penyebab aparat tidak mempunyai urgensi untuk mensosialisasikan informasi secara terbuka dan transparan.

### **Kesimpulan**

Tentang keterlibatan warga dalam hal penyampaian gagasan atau prakarsa pembangunan, bahwa tampak adanya keterlibatan dari masyarakat Kampung Pepas Asa. Namun demikian keterlibatan ini masih bersifat instrumental. Artinya hanya untuk memenuhi persyaratan program. Dengan kata lain, wujud keterlibatan masyarakat dalam penyampaian gagasan dikategorikan sebagai keterlibatan semu. Masyarakat tampak terlibat dalam hal prakarsa, tetapi sesungguhnya perencanaan ide awal berasal dari pemerintah, dan juga model atau format dalam hal penyusunan dan pengajuan proposal kegiatan adalah gagasan pemerintah.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih bersifat formalitas atau semu. Masyarakat yang hadir dalam musyawarah atau rapat kampung, tetapi umumnya tidak aktif mengajukan pendapat dan cenderung menyetujui saja keputusan yang diambil. Yang lebih berperan adalah pengurus kampung dan atau pengurus kegiatan pembangunan. Keengganan untuk memberikan pendapat dan mempengaruhi keputusan disebabkan oleh karena masyarakat tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk terlibat secara produktif dalam pengambilan keputusan. Kapabilitas dalam hal pengambilan keputusan ini berkorelasi dengan tingkat pendidikan warga yang umumnya masih rendah. Selain itu belum ada instrument hukum yang mengatur tentang bagaimana, dimana dan siapa yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan pembangunan relative baik. Swadaya masyarakat berupa material dan peralatan kerja untuk pembangunan infrastruktur, dan penyediaan konsumsi dalam kegiatan gotong royong. Sementara itu keterlibatan dalam hal mobilisasi tenaga, yakni keterlibatan masyarakat sebagai tenaga kerja dalam kegiatan gotong royong semakin menurun. Tingkat keaktifan yang cenderung rendah ini setidaknya disebabkan oleh kesibukan dalam pekerjaan sehari-hari untuk mencari nafkah; warga mengharapkan insentif lebih; dan terbatasnya kemampuan dan wibawa aparat kampung untuk memobilisasi warga. Singkatnya, keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan untuk berkorban dan berkontribusi dalam kegiatan pembangunan.

Keterlibatan dalam hal mengatasi masalah dapat disimpulkan bahwa belum terdapat mekanisme pemecahan masalah yang baku untuk mengatasi persoalan yang timbul dari pelaksanaan program pembangunan. Dan terhadap permasalahan yang timbul, warga masyarakat cenderung bersikap pasif dan mempercayakan pada pengurus kampung dan atau pengurus kegiatan untuk menangani masalah yang timbul, karena dipandang sebagai pihak yang memiliki kewenangan.

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelestarian atau pemeliharaan hasil pembangunan relative baik yang ditandai dengan adanya inisiatif pengurus dan warga melalui musyawarah, menetapkan biaya atau tarif yang dibebankan pada masyarakat, yang mana dana tersebut dimanfaatkan untuk biaya operasional dan perawatan infrastruktur yang telah dibangun.

Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, terdapat beberapa faktor yang disinyalir telah mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, namun yang cenderung dominan adalah factor pekerjaan dan penghasilan, factor insentif atau balas jasa dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, dan factor kemampuan atau wibawa aparat kampung dalam memobilisasi warga.

### **Rekomendasi**

Secara konsepsional, PNPM Mandiri Perdesaan dimasudkan untuk mengembangkan sistem, mekanisme dan prosedur program penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, dan mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat lokal, dengan penyediaan pendampingan dan dana stimulan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, terutama menyangkut aspek partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Partisipasi yang terjadi masih bersifat semu, dalam arti hanya untuk memenuhi ketentuan program. Oleh karena itu mutlak diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi dengan mengoptimal kegiatan penyadaran dan sosialisasi secara efektif. Partisipasi tidak hanya sebagai keikutsertaan dalam kegiatan fisik, tetapi lebih dalam lagi sebagai wujud kesediaan dan kemampuan individu untuk berkorban dan berkontribusi dalam kegiatan pembangunan demi kesejahteraan seluruh masyarakat kampung.

Tak dapat dipungkiri bahwa PNPM Mandiri Perdesaan dianggap bermanfaat oleh masyarakat, terutama untuk penyediaan infrastruktur di kampung. Namun demikian program pembangunan kampung hendaknya tidak hanya didominasi dengan kegiatan fisik. Alangkah baiknya jika diprioritaskan pada peningkatan kapasitas, dalam arti pengetahuan dan ketrampilan aparat kampung dan masyarakat dalam hal kelembagaan, komunikasi dan kepemimpinan. Sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan keberanian untuk menyatakan pendapat dan terlibat aktif dalam penyampaian gagasan terkait kegiatan pembangunan. Di lain pihak aparat kampung juga memiliki kemampuan dan kewibawaan dalam hal kepemimpinan sehingga mampu menjadi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan kampung dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip partisipatif, antara lain: kesetaraan, transparansi, dan pemberdayaan.

### **Daftar Pustaka**

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Chambers, Robert. 1988. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Terjemahan Pepep Sudrajat, LP3ES, Jakarta
- , 1996. *Participatory Rural Apraisal (Memahami Desa Secara Partisipatif)*, Terjemahan Y. Sukoco, Kanisius, Yogyakarta.

- Carlson. 1985. "Mobilisasi Ekonomi Nasional Bangsa-Bangsa Berkembang" dalam Belling dan Totten (ed), Modernisasi Masalah Model Pembangunan. Terjemahan Mien Joebhaar dan Hasan Basri, Rajawali, Jakarta.
- Cohen, John dan Norman T. Uphoff. 1977. *Rural Development Participation: Concepts, Measures for Project Design*, Development Monograf number 2. Rural Development Committee Center for International Studies, Cornell University.
- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*, Terjemahan Susasetiawan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. 2009. PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Jakarta.
- Dilla, Sumadi. 2007. *Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Terpadu*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Dusseldrop, D.B.W.M. and J.M. Van Staeveren. 1980. *Framework for Regional Planning in Developing Countries*, Netherlands: International Institute for Land Reclamation and Improvement.
- , 1992. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa*. Jilid II Metode dan Teknik Lat Kajian, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Emilia, Emi. 2009. *Menulis Tesis dan Disertasi*. Alfabeta, Bandung.
- Fernandez, Johannes. 1992. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah dan Upaya Memacu Pembangunan Regional di Masa Depan*, dalam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial 2. hal.26-36. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harun, H. Rochajat & Ardianto, Elvinaro. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Herawatty, Ratna. 2006. *Strategi Peningkatan Partisipasi Dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi*, Thesis. Magister Teknik Arsitektur yang tidak dipublikasikan. FTSP-ITS, Surabaya.
- Hosseini, Benyamin. 1998. *Otonomi dan Pemerintahan Daerah. Tinjauan Teoritik*, dalam R. Siti Zuhro: *Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan*, PPW-LIPI, Jakarta.
- Koswara, E. 1999. *Otonomi Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional tentang Otonomi Daerah di Universitas Brawijaya, Malang, 4 Oktober 1999.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Kusumaatmaja, Sarwono. 1992. *Manajemen Administrasi Pemerintahan Khususnya Pengambilan Keputusan, Koordinasi dan Kepemimpinan*. dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial No.2 hal 17-25, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi & Sosial. 2008. *Qualitative Baseline Survey on PNPM-2007*. LP3ES, Jakarta.
- Lincoln, YS dan EG. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hill: Sage Publications.
- Mubyarto, 1984, *Strategi Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Jogjakarta.
- , 1988. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta.

- Mafruhah, Izza. 2009. *Multidimensi Kemiskinan*, Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, Surakarta.
- Moeljarto, T. 1995. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Arah dan Strategi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat tinggal Landas*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pahmi, Sy. 2010. *Antropologi Pedesaan, Perspektif Baru*. GP Press, Jakarta.
- Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Gadjah Mada University Press.
- Rahardjo, M. Dawam. 1988. *Mulai Berguru Dari Rakyat*, dalam Robert Chambers: *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, Terjemahan Pepep Sudrajat, LP3ES, Jakarta.
- Riggs, F.W.1988. *Administrasi Negara Berkembang*, Teori Masyarakat Prismatic, Terjemahan Yasogama, Radjawali, Jakarta.
- Rondinelli, Dennis A. 1981. *Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries*, International Review of Administration Science, Vol.XL. VII Number 2.
- Said, M. Mas'ud. 2008. *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*, UMM Press, Malang.
- Samego, Indria, 1998. *Pembatasan Peran Negara*, dalam Harian Umum Republik, edisi 18 September 1999, hal 2.
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Slamet, Yulius. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Sibero, Atan. 1992. *Otonomi Daerah Sebagai Jalan Untuk Maju*, dalam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial No.2 Hal.61-618, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siedentopf, Heinrich. 1989. *Decentralization for Rural Development: Government Approaches and People's Initiative in Asia and The Pacific*, Planning and Administration Asia and Pacific Special IULA, Vol.16 Number 2.
- Soekartawi, 1990. *Prinsip dasar Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah*. Radjawali. Jakarta
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- . 1996. *Memberdayakan Rakyat Dalam Pembangunan Indonesia*, dalam Anggito Abimanyu (eds), *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, PAU-SE UGM bersama BPFE, Yogyakarta.
- Suharto, Edi.2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Sumampouw, Monique. 2004. *Participant of Sport*, W.B. Saunders Company, London.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial*. Kompas, Jakarta.
- Suwignyo, 1985. *Pembangunan Desa dan Sumber Pendapatan Desa*. Ghalia Indonesia, Jakarta

- Syamsi, Ibnu. 1986. *Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan Pemorogaman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Radjawali, Jakarta.
- Syukri, Muhammad, dkk. 2011. *Studi Kualitatif Dampak PNPM-Perdesaan Tahun 2010 di Provinsi Jawa Timur, Sumatra Barat, dan Sulawesi Tenggara*. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung*, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1993. *Politik Pembangunan. Sebuah Analisis Konsep Arah dan Strategi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuvenalis. 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Alokasi Dana Kampung (ADK)*. Thesis. Magister Ilmu Administrasi Negara yang tidak dipublikasikan. FISIP-UNMUL, Samarinda.
- Zuhro, R. Siti. 1998. *Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan*, PPW-LIPI, Jakarta.